

The Role of the Water and Road Technical Implementation Unit (UPTD) of the Public Works, Highways, and Water Resources Agency in the Maintenance and Control of Irrigation Channels in Sidoarjo Regency

[Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo]

Yoyon Wiroti¹⁾, Hendra Sukmana ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze and describe the role of the Water and Road Technical Implementation Unit (UPTD) of the Public Works, Highways, and Water Resources Agency of Sidoarjo Regency in the maintenance and control of irrigation channels. The study employed a qualitative descriptive approach using interviews, observations, and documentation, while data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model based on Jim Ife's role theory, which consists of the facilitator, educational, representative, and technical roles. The findings reveal that the facilitator role was implemented through irrigation channel maintenance, routine inspections, the provision of public complaint channels, and follow-up actions on community reports. The educational role was carried out through socialization and outreach programs on water distribution, irrigation maintenance, and the importance of maintaining clean irrigation channels. The representative role was demonstrated through coordination with village governments, Water User Associations (P3A), farmer groups, and the community in managing irrigation channels. Meanwhile, the technical role was implemented through data collection, field surveys, monitoring, damage identification, documentation, and reporting to determine maintenance priorities. Overall, the UPTD has fulfilled its roles in supporting sustainable irrigation channel management and ensuring effective water distribution for the agricultural sector in Sidoarjo Regency.*

Keywords - Role, Water and Road Technical Implementation Unit (UPTD), Irrigation Channels

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana berdasarkan teori peran Jim Ife yang meliputi peran fasilitator, edukasional, representatif, dan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fasilitator diwujudkan melalui perawatan saluran, inspeksi rutin, penyediaan media pengaduan, dan tindak lanjut laporan masyarakat. Peran edukasional dilaksanakan melalui sosialisasi dan penyuluhan mengenai pembagian air, pemeliharaan saluran, serta pentingnya menjaga kebersihan irigasi. Peran representatif diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, P3A, kelompok tani, dan masyarakat dalam pengelolaan saluran irigasi. Peran teknis dilaksanakan melalui pendataan, survei, monitoring, identifikasi kerusakan, dokumentasi, dan penyusunan laporan sebagai dasar penentuan prioritas pemeliharaan. Secara keseluruhan, UPTD telah menjalankan perannya dalam mendukung kelancaran distribusi air dan keberlanjutan fungsi saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo.*

Kata Kunci - Peran, UPTD Air dan Jalan, Saluran Irigasi

I. PENDAHULUAN

Secara sosio-historis maupun ekologi Indonesia merupakan negara agraris, di mana sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam. Berbagai bentuk aktivitas produksi pertanian, mulai dari pertanian sawah (padi), perkebunan, perikanan darat dan laut serta hutan, telah menjadi mata pencaharian pokok masyarakat secara turun temurun. Pengembangan pertanian, sistem sosial budaya masyarakatnya pun tidak lepas dari siklus - siklus dunia pertanian itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah dengan berbagai terobosan berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian guna meningkatkan pendapatan petani. Produktivitas pertanian didukung dengan sistem pengairan yang baik dengan adanya pengelolaan jaringan irigasi yang baik pula. Dalam dunia pertanian terutama irigasi, water resources sustainability sangat penting, maka pengelolaan menggunakan air untuk irigasi harus mengacu pada prinsip tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama bagi keberhasilan pembangunan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

pertanian dari program swasembada beras menjadi swasembada pangan. Hujan bagi beberapa wilayah di Indonesia yang beriklim tropis bisa jadi merupakan anugerah tersendiri bagi masyarakatnya, namun pada beberapa wilayah perkotaan hujan bisa menjadi masalah atau bahkan musibah dikarenakan air hujan yang menggenang tidak dapat mengalir dengan baik sehingga menyebabkan banjir. Salah satu alasan hal ini dapat terjadi dikarenakan sistem drainase pada wilayah perkotaan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sumber daya air, perlu diperhatikan tujuh asas, yakni asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas [1]. Air beserta sumber-sumbernya merupakan kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh manusia, oleh karena itu perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak. Irigasi dimaksudkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi [2].

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air secara terpadu yang mencakup aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak [3]. Irigasi berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan irigasi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Irigasi merupakan landasan hukum utama yang mengatur pengelolaan air untuk sektor pertanian di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan fokus pada keberlanjutan fungsi irigasi di tengah pesatnya pembangunan daerah. Secara garis besar, peraturan ini menetapkan bahwa pengelolaan sistem irigasi di Sidoarjo diselenggarakan dengan prinsip keterpaduan yang melibatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat petani melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Pemerintah Daerah melalui dinas terkait memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan serta pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder, sementara jaringan irigasi tersier diserahkan kepada kreativitas dan tanggung jawab kelompok tani. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi air yang adil dan efisien hingga ke petak sawah paling ujung.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki tugas dan fungsi strategis yakni berkenaan dengan sumber air yang menjadi bagian dari tugas pokok yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya air Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air, dan sub urusan drainase serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten [4]. Lahan pertanian yang tersebar di berbagai desa dan sebagian besar memanfaatkan jaringan irigasi untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Desa-desa yang mendapatkan layanan irigasi umumnya memiliki kawasan persawahan yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, kondisi lahan dan jaringan irigasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti alih fungsi lahan, keterbatasan debit air terutama pada musim kemarau, sedimentasi, kerusakan, serta penyempitan saluran. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran distribusi air dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, diperlukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi secara berkelanjutan, disertai pengaturan distribusi air yang tepat agar kebutuhan air setiap lahan pertanian dapat terpenuhi secara merata.

Di dalam Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya air Kabupaten Sidoarjo terdapat Bidang Sumber Daya Air dan jalan yang dimana memiliki salah satu tugas yaitu pengumpulan dan pengolahan perencanaan jaringan irigasi [5]. Dalam pengelolaan irigasi di Kabupaten Sidoarjo, OPD yang memiliki peran utama adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo, khususnya bidang yang menangani sumber daya air dan jaringan irigasi. OPD tersebut bertugas dalam pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, serta pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan irigasi juga membutuhkan koordinasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan air pertanian, pola tanam, dan kepentingan petani. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa juga berperan dalam membantu koordinasi di tingkat wilayah serta menyampaikan kondisi dan kebutuhan irigasi yang dihadapi masyarakat dan kelompok tani.

Dalam tugas tersebut Bidang Sumber Daya Air dan jalan dibantu UPTD dalam melaksanakan tugas lapangan, salah satunya yaitu UPTD Sumpat dimana UPTD Sumpat memiliki tugas merawat dan pengecekan di saluran irigasi serta mengendalikan pintu air DAM Sumpat dan DAM Urangagung, membersihkan lumpur di sekitar bangunan pintu air, membersihkan rumput atau tumbuhan air di lingkungan DAM, dan mengatur debit air pada pintu air setiap 10 hari sekali. Selain itu UPTD Sumpat juga bertindak dalam merespon laporan sumbatan atau kerusakan jaringan irigasi yang memerlukan penanganan darurat yang secara langsung berdampak pada resiko banjir di area pertanian maupun permukiman. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi Pada Pasal

65 kinerja irigasi perlu pengelolaan dan pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemuktahiran hasil inventarisasi aset irigasi. Berikut merupakan data inventaris alat di UPTD Sumput Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Inventaris Alat UPTD Sumput Tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Sabit	80 Buah
2	Cakar	50 Buah
3	Cangkul	80 Buah
4	Jangkar	5 Buah
5	Mesin Potong	13 Buah
6	Bergaji Mesin	2 Buah

Sumber : UPTD Sumput, 2026

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa macam alat dalam mendukung tugas dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi di UPTD Sumput. Berbagai macam alat yang dimiliki tersebut jumlahnya sudah memenuhi kebutuhan atas tugas UPTD Sumput. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dalam hal pengelolaan dan pengendalian saluran irigasi masih menjadi tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya air Kabupaten Sidoarjo. Kompleksitas tugas yang penuh tantangan dalam meningkatkan kinerja Bidang Sumber Daya Air pada Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo. Tata kelola dengan peningkatan aparatur dengan stakeholder menjadi tugas penting dan perlu memperoleh perhatian untuk menjaga dan memelihara sumberdaya air khususnya irigasi sangat berpengaruh terhadap pelestarian lingkungan hidup dan menentukan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjamin kelestarian ekosistem. Berikut merupakan data saluran irigasi UPTD Sumput sebagai berikut :

Tabel 2. Data Saluran Irigasi UPTD Sumput

No.	Nama Saluran	Panjang Saluran	Keadaan Saluran
1	MK III	40,571 KM	Baik
2	Sekunder Botokan	8,699 KM	Baik
3	Sekunder dungus	5,882 KM	Sangat Baik
4	Sekunder Ketegan	3,300 KM	Baik
5	Sekunder Ketawang	8,185 KM	Sangat Baik
6	Sekunder Seruni	5,900 KM	Sangat Baik
7	Sekunder Gedangan	1,805 KM	Baik
8	Sekunder Kemasan II	3,655 KM	Baik
9	Sekunder Purboyo IIIb	3,246 KM	Baik
10	Sekunder Gambir Anom	6,658 km	Sangat Baik

Sumber : UPTD Sumput, 2026

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa UPTD Sumput memiliki 10 saluran irigasi yang termasuk didalam lingkup UPTD Sumput. Saluran irigasi yang berada dalam lingkup UPTD Sumput merupakan wilayah daerah persawahan dimana sebagian besar masyarakat setempat memiliki mata pencaharian sebagai petani. Sehingga kondisi saluran irigasi sebisa mungkin dipastikan dalam kondisi baik guna menunjang kebutuhan air di 10 wilayah tersebut. Berdasarkan data diatas diketahui bahwa keseluruhan keadaan saluran irigasi UPTD Sumput dalam kondisi baik dan sangat baik.

Berdasarkan data diatas mengenai Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian terdahulu juga dijumpai permasalahan yang sama terkait penelitian saat ini. Pertama, penelitian terdahulu berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur dalam Mengelola Irigasi di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi” tahun 2024 dijumpai hasil bahwa pelaksanaan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban pengelolaan irigasi yang belum dilakukan secara optimal. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengelola irigasi di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur meliputi: sumber daya manusia para ASN di lingkungan dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang khususnya bidang Sumbar Daya Air yang kurang baik dari kualitas dan kuantitas, faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dan anggaran yang kurang dan tidak sesuai dengan kebutuhan [7].

Kedua, penelitian terdahulu berjudul “Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kabupaten Sleman” Tahun 2023 dijumpai hasil bahwa pengawasan internal-preventif telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh tugas pokok dan fungsi dan bahwa pengawasan interval-represif telah dilaksanakan dalam bentuk sanksi. Masyarakat melakukan pengawasan preventif dan represif dalam bentuk musyawarah dan system pelaporan. Pemerintah mengendalikan penggunaan sumber daya air dengan menyelenggarakan sistem perizinan, teguran, pembinaan, dan penyelesaian sengketa [8].

Ketiga, penelitian terdahulu berjudul “Peranan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Menangani Masalah Banjir” tahun 2023 dijumpai hasil Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penanganan banjirnya telah mencari akar permasalahan sehingga dapat diketahui penyebab banjirnya. Banjir yang sering terjadi di Perumahan tersebut dikarenakan pengelola (*developer*) pembangunan tidak mengikuti Surat Rekomendasi Banjir yang telah diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Kemudian menindak lanjutkan dengan merencanakan kegiatan dan anggaran yang mana berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan untuk tetap memberikan rekondisi dilapangan [9].

Berdasarkan observasi awal dilapangan pada penelitian Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo dijumpai beberapa permasalahan terkait diantaranya : pertama, Koordinasi antar pihak terkait (desa dan petani) untuk mendukung dalam perawatan dan pengendalian di saluran irigasi belum terjalin dengan baik. Kedua, belum optimalnya koordinasi antara OPD terkait. Ketiga, masih terdapat bangunan liar atau jembatan yang didirikan tanpa seizin Dinas terkait hal tersebut menyebabkan saluran irigasi dapat terganggu. Keempat, masyarakat belum dapat berperan aktif dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi.

Peran merupakan bentuk tanggung jawab dimiliki oleh seseorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya [10]. Konsep peran juga selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi yang pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial yang artinya bahwa peran adalah perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial [11]. Menurut Jim Iffe dalam peran pengembang masyarakat adalah mengembangkan kapasitas pelaku masyarakat sehingga mampu mengorganisir dan menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan usaha mereka. Pengembangan masyarakat dikelompokkan dalam empat golongan, sebagai berikut : 1) Peran fasilitator adalah peran yang dicurahkan untuk memfasilitasi, memperkuat, mengakui serta menghargai kontribusi dan kerja yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam meningkatkan produktivitas. 2) Peran edukasional yaitu membantu pelaksanaan proses peningkatan produktivitas dan berperan aktif dalam memberikan masukan dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman bagi individu maupun kelompok. 3) Peran representasi merupakan peran pemerintah dalam melakukan interaksi dengan pihak luar demi kepentingan yang bermanfaat. 4) Peran teknis merupakan kemampuan para pegawai dalam melakukan pengumpulan dan analisis data, kemampuan menggunakan komputer, kemampuan melakukan presentasi, manajemen serta melakukan pengendalian finansial dan melakukan *need assessment* terhadap pengembangan potensi individu atau kelompok [12]. tujuan dari penelitian saat ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Dalam penelitian tentang “Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo” ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah suatu upaya peneliti mengumpulkan data dengan berlandaskan pada latar ilmiah [13]. Penggunaan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan secara terperinci dan mendalam terkait Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pada UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari kegiatan wawancara yang dilakukan dengan informan secara langsung Kepala PLT UPTD Sumpat, Juru Sekunder Botokan, dan petani. Fokus dalam penelitian ini ialah berkaitan dengan Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan fokus indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peran UPTD Air dan Jalan ini ialah dengan menggunakan teori Peran Menurut Jim Iff yang memiliki beberapa indikator yakni Peran fasilitator, Peran edukasional, Peran representasi, dan Peran teknis.

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan memilih informan yang berdasarkan pada penilaian atas karakteristik sampel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan atau disebut dengan *purposive sampling*. Sedangkan untuk teknik analisis data hasil penelitian berpedoman pada model analisis data dari Miles dan Huberman, teknis analisis data ialah proses mengorganisir, menganalisis dan menginterpretasikan data non numeric menjadi sebuah informasi atau trend yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan penelitian. Kegiatan proses analisis data dibagi menjadi tiga langkah yakni 1) Pengumpulan Data, yakni proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian 2) Reduksi data, yakni proses melakukan pemilihan, pemfokusan, pengabstraksian dan transformasi data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 3) Penyajian data, yakni pengumpulan data yang tersusun dan memberikan peluang terjadinya penarikan kesimpulan. 4) Penarikan kesimpulan, yakni kegiatan menyimpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan pada pendahuluan [14].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

peran adalah tanggung jawab dimiliki oleh seseorang maupun instansi pemerintah yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk mengetahui Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan analisis teori peran menurut Jim Iff yang meliputi peran fasilitator, peran edukasional dan peran teknis yang dilakukan oleh UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

A. Peran Fasilitator

Pada teori John Iff dan Frank Tesoriero, peran fasilitator sendiri merupakan peran dimana pemerintah memiliki peran mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya melalui beberapa upaya yang bersifat fasilitatif [15]. Dalam menggali peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa instrumen pertanyaan yang berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD, implementasi tindakan perawatan dan pengendalian saluran irigasi, penerapan standar operasional prosedur (SOP), komitmen organisasi dalam menjaga keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan pertama mengkaji berbagai langkah yang telah dilakukan oleh UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perawatan dan pengendalian saluran irigasi guna menjaga kelancaran distribusi air, mencegah kerusakan infrastruktur, dan mendukung produktivitas sektor pertanian. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy Wiehanto, ST selaku Kepala UPTD Sumpat yang menjadi informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

“UPTD Air dan Jalan memiliki peran utama dalam melaksanakan perawatan dan pengendalian saluran irigasi agar tetap berfungsi secara optimal. Kegiatan yang kami lakukan meliputi pembersihan saluran dari sedimentasi dan sampah, pemotongan rumput atau tanaman liar yang menghambat aliran air, perbaikan kerusakan ringan pada saluran maupun bangunan irigasi, serta melakukan monitoring dan inspeksi secara berkala. Selain itu, kami juga menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait kerusakan saluran irigasi sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga kelancaran distribusi air bagi kebutuhan pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan disesuaikan dengan tingkat prioritas kerusakan di lapangan.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botolan Menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“Dalam melaksanakan perawatan dan pengendalian saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo, kami melakukan berbagai upaya secara rutin maupun berdasarkan kondisi di lapangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi inspeksi berkala terhadap jaringan irigasi, pembersihan saluran dari sampah dan sedimentasi, pemeliharaan bangunan pelengkap irigasi, serta penanganan kerusakan yang berpotensi menghambat aliran air. Selain itu, kami juga menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan penentuan prioritas penanganan. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sehingga perawatan dan pengendalian saluran irigasi dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan mampu mendukung kelancaran distribusi air bagi masyarakat, khususnya di sektor pertanian.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan peranannya dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi melalui kegiatan inspeksi rutin, pemeliharaan, penanganan kerusakan, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur sebagai upaya menjaga kelancaran fungsi saluran irigasi dan mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pertanian. Berikut merupakan perbandingan jumlah pelaporan terkait masalah irigasi melalui beberapa cara pengaduan sebagai berikut :

Tabel 3. Aduan Masyarakat terhadap Saluran Irigasi Tahun 2024-2025

Aduan Masyarakat	Tahun	
	2024	2025
Call Center 112	3	5
Wahatsapp	0	15
Instagram	4	2
Apk. Lapor	4	2
Surat Elektronik	39	20
Jumlah	50	44

Sumber : UPTD Sumput, 2026

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui persentase penurunan aduan di tahun 2025 sebesar sebesar 12%. Hasil tersebut dapat mengindikasikan bahwa berbagai permasalahan yang disampaikan masyarakat telah ditangani melalui saluran pengaduan yang tersedia, sehingga permasalahan yang berulang dapat diminimalkan. Selain itu, tersedianya berbagai media pengaduan seperti Call Center 112, WhatsApp, Instagram, Aplikasi LAPOR, dan surat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, penurunan jumlah aduan tidak semata-mata menunjukkan berkurangnya permasalahan, tetapi juga dapat mencerminkan bahwa mekanisme pelayanan, koordinasi, dan tindak lanjut pengaduan telah berjalan lebih baik dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat atau petani melakukan laporan terkait masalah irigasi kepada UTD Sumput. Namun, laporan tersebut masih sering terjadi kesalah pahaman antara UPTD Sumput dengan petani dikarenakan komunikasi yang belum terjalin dengan baik antara keduanya sebagaimana disampaikan oleh Bapak oleh Bapak Dedy Wiehanto, ST selaku Kepala UPTD Sumput Sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pengelolaan saluran irigasi, kami mengakui bahwa masih sering terjadi kesalahpahaman antara UPTD Air dan Jalan Wilayah Sumput dengan para petani. Kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh komunikasi yang belum terjalin secara optimal, terutama terkait penyampaian jadwal pemeliharaan, pembagian air irigasi, maupun penanganan kerusakan saluran. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok tani melalui pertemuan, sosialisasi, serta penyampaian informasi

secara langsung agar tidak terjadi perbedaan persepsi dan kerja sama dalam pengelolaan saluran irigasi dapat berjalan lebih baik.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Petani di Wilayah Irigasi UPTD Sumput sebagai berikut :

“Menurut kami, sampai saat ini masih sering terjadi kesalahpahaman antara petani dengan pihak UPTD Air dan Jalan Wilayah Sumput. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan penyampaian informasi mengenai jadwal pemeliharaan saluran irigasi, pembagian air, maupun penanganan kerusakan. Akibatnya, kami terkadang memiliki pemahaman yang berbeda dengan pihak UPTD mengenai kondisi di lapangan. Kami berharap komunikasi dan koordinasi antara UPTD dengan petani dapat lebih ditingkatkan agar setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan pengelolaan saluran irigasi dapat berjalan lebih lancar.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan data pendukung, dapat disimpulkan bahwa UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan peran fasilitator dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi melalui pelaksanaan inspeksi rutin, pemeliharaan saluran, penyediaan berbagai saluran pengaduan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Penurunan jumlah aduan dari 50 pada tahun 2024 menjadi 44 pada tahun 2025 dan meningkatnya penggunaan WhatsApp sebagai media pengaduan menunjukkan adanya upaya UPTD dalam mempermudah akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Namun, peran tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kesalahpahaman antara UPTD dengan petani akibat komunikasi dan penyampaian informasi yang belum efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa UPTD telah melaksanakan peran fasilitator sebagaimana dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, yaitu memfasilitasi masyarakat melalui penyediaan layanan, mengakomodasi kebutuhan, serta mendorong komunikasi dan partisipasi dalam penyelesaian masalah, meskipun aspek komunikasi dan koordinasi masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu berjudul “Peranan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Menangani Masalah Banjir”, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pemerintah sebagai fasilitator tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi, koordinasi, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat sehingga pengelolaan infrastruktur dapat berjalan secara efektif.

B. Peran Edukasional

Peran edukasional mengacu pada sejauh mana pemerintah menjalankan fungsinya dalam memberikan edukasi, pemahaman, dan pengetahuan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya. Peran ini juga mencakup penyampaian informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipercaya sehingga masyarakat mampu memahami kebijakan, program, maupun layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah [16]. Pembahasan mengenai peran edukasional dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat, khususnya petani dan pengguna jaringan irigasi, terkait pentingnya perawatan, pengendalian, serta pemanfaatan saluran irigasi secara tepat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kegiatan edukasi kepada masyarakat masih belum menjadi program yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan. Edukasi yang diberikan umumnya masih bersifat insidental, seperti pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan atau ketika terdapat permasalahan yang memerlukan koordinasi dengan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy Wiehanto, ST selaku Kepala UPTD Sumput yang menjadi informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

“Selama ini kami memang belum memiliki program edukasi yang dilaksanakan secara khusus dan rutin kepada masyarakat maupun kelompok tani mengenai perawatan dan pengendalian saluran irigasi. Edukasi biasanya kami berikan ketika melakukan kegiatan di lapangan, saat berkoordinasi dengan kelompok tani, atau ketika ada laporan mengenai permasalahan pada saluran irigasi. Dalam kesempatan tersebut, kami menyampaikan pentingnya menjaga kebersihan saluran, tidak membuang sampah ke dalam saluran irigasi, serta mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila ditemukan kerusakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Ke depan, kami berupaya meningkatkan kegiatan sosialisasi agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga jaringan irigasi secara bersama-sama.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Pernyataan diatas juga diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botokan sebagai berikut :

“Menurut kami, sosialisasi dari pihak UPTD mengenai cara menjaga saluran irigasi masih belum dilakukan secara rutin. Informasi biasanya kami terima ketika ada petugas yang turun ke lapangan atau saat ada perbaikan saluran irigasi. Kami berharap ke depan ada kegiatan sosialisasi yang lebih terjadwal sehingga para petani dapat memahami cara merawat saluran irigasi, mengetahui pembagian tugas antara masyarakat dan pemerintah, serta memperoleh informasi yang jelas mengenai pemeliharaan dan penanganan kerusakan saluran irigasi.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran edukasional UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi masih belum dilaksanakan secara optimal karena belum terdapat program sosialisasi yang rutin dan terstruktur. Edukasi kepada masyarakat masih bersifat insidental, yaitu dilakukan ketika petugas berada di lapangan atau saat terjadi permasalahan pada saluran irigasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kegiatan sosialisasi secara berkala agar komunikasi antara UPTD dan masyarakat, khususnya petani, dapat terjalin lebih baik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan fungsi saluran irigasi. Berikut merupakan dokumentasi sosialisasi terkait penanganan dan menjaga saluran irigasi di lingkungan UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:



Sumber : UPTD Sumput, 2026
Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa kegiatan sosialisasi melibatkan Pemerintah Desa, Petani, OPD terkait, dan Tokoh Masyarakat mengenai perawatan dan pengendalian saluran irigasi membahas berbagai materi yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan petani dalam mengelola kebutuhan air irigasi secara efektif dan efisien. Kegiatan ini membahas strategi pengaturan pola tanam yang disesuaikan dengan ketersediaan air, jadwal pembagian air irigasi, pentingnya menjaga kebersihan dan kelancaran saluran irigasi, serta langkah-langkah perawatan dan pengendalian jaringan irigasi secara partisipatif. Selain itu, petani diberikan pemahaman mengenai pentingnya menaati ketentuan pemanfaatan saluran irigasi, tidak mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas yang dapat menghambat aliran air, serta meningkatkan koordinasi dengan UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), pemerintah desa, dan Perkumpulan Petani apabila terjadi kendala dalam pendistribusian air selama musim kemarau. Melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tersebut diharapkan petani mampu memanfaatkan sumber daya air secara bijaksana sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga meskipun menghadapi keterbatasan ketersediaan air. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy Wiehanto, ST selaku Kepala UPTD Sumput Sebagai berikut :

“Kami melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada para petani menjelang musim tanam tahun 2026 pada musim kemarau. Dalam kegiatan tersebut kami menyampaikan pengaturan jadwal pembagian air irigasi, pola tanam yang disesuaikan dengan ketersediaan air, pentingnya menjaga kebersihan saluran irigasi, serta mengimbau petani agar tidak mendirikan bangunan atau melakukan aktivitas yang dapat menghambat aliran air. Melalui sosialisasi ini kami berharap petani dapat memanfaatkan air secara efisien dan turut berpartisipasi dalam menjaga kondisi saluran irigasi agar tetap berfungsi dengan baik selama musim kemarau.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Bapak Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botokan menyampaikan hal serupa sebagai berikut :

“Kami pernah mengikuti sosialisasi dari UPTD sebelum musim tanam, terutama saat memasuki musim kemarau. Dalam sosialisasi itu dijelaskan mengenai pembagian air, jadwal pengairan, dan pentingnya menjaga saluran irigasi. Namun, kegiatan sosialisasi tersebut tidak dilakukan setiap bulan, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan atau menjelang musim tanam.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, peran edukasional UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan penyampaian informasi kepada petani mengenai pengaturan pembagian air irigasi, pola tanam, pentingnya menjaga kebersihan saluran, serta pelaporan apabila terjadi kerusakan jaringan irigasi. Namun, kegiatan tersebut masih bersifat insidental dan belum dilaksanakan secara rutin maupun terprogram sehingga belum sepenuhnya optimal. Temuan ini sejalan dengan teori peran Jim Ife yang menyatakan bahwa peran edukasional menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang bertugas memberikan pendidikan, informasi, dan peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu memahami permasalahan serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks penelitian ini, UPTD telah menjalankan fungsi edukasional, tetapi pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui program sosialisasi yang berkelanjutan sehingga mampu membangun kesadaran dan partisipasi petani dalam menjaga saluran irigasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu berjudul Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air untuk Irigasi di Kabupaten Sleman (2023) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pengawasan dan pengendalian, tetapi juga oleh edukasi dan koordinasi yang berkesinambungan kepada masyarakat sebagai pengguna jaringan irigasi. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan fungsi edukasional yang dilakukan UPTD, semakin besar pula peluang terciptanya partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan perawatan dan pengendalian saluran irigasi di Kabupaten Sidoarjo.

C. Peran Representasi

Pembahasan mengenai peran representatif dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pemerintah dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perawatan dan pengendalian saluran irigasi. Peran tersebut diwujudkan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kelompok tani, serta masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi jaringan irigasi, menampung aspirasi dan laporan kerusakan, serta menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, UPTD berupaya memastikan bahwa kegiatan perawatan dan pengendalian saluran irigasi dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy Wiehanto, ST selaku Kepala UPTD Sumpat yang menjadi informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan perawatan dan pengendalian saluran irigasi, kami masih menemukan beberapa kendala di lapangan, salah satunya adalah adanya bangunan liar maupun jembatan yang dibangun oleh masyarakat tanpa izin dari dinas terkait. Keberadaan bangunan tersebut sering kali menghambat akses petugas dalam melakukan pemeliharaan, pembersihan, maupun normalisasi saluran irigasi, bahkan pada beberapa lokasi dapat mengganggu kelancaran aliran air. Oleh karena itu, kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat agar setiap pembangunan yang berada di sekitar saluran irigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botokan Sebagai berikut:

“Selama melakukan pengawasan di wilayah kerja, kami masih sering menemukan bangunan liar maupun jembatan yang dibangun oleh masyarakat tanpa adanya koordinasi atau izin dari dinas terkait. Kondisi tersebut

cukup menyulitkan kami ketika melakukan inspeksi, pembersihan, maupun pemeliharaan saluran irigasi karena akses menjadi terbatas dan aliran air pada beberapa titik menjadi kurang lancar. Oleh karena itu, kami selalu mengimbau masyarakat agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun UPTD sebelum mendirikan bangunan di sekitar saluran irigasi, sehingga keberadaan bangunan tersebut tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi dan kegiatan pemeliharaan dapat berjalan dengan baik.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan perawatan dan pengendalian saluran irigasi, khususnya adanya bangunan liar dan jembatan yang didirikan tanpa izin di sekitar saluran irigasi. Keberadaan bangunan tersebut menghambat akses petugas dalam melakukan pemeliharaan serta berpotensi mengganggu kelancaran aliran air. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara UPTD, pemerintah desa, dan masyarakat agar setiap pembangunan di sekitar saluran irigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga fungsi jaringan irigasi dapat tetap terjaga. Salah satunya melalui kegiatan kerja bakti untuk membersihkan saluran, mengurangi sedimentasi, dan menjaga lingkungan sekitar jaringan irigasi. Kegiatan kerja bakti juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga saluran irigasi. Namun, kegiatan tersebut perlu disertai pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait agar bangunan yang menghambat saluran dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kerja bakti tidak hanya membantu menjaga kebersihan dan kelancaran saluran, tetapi juga memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mempertahankan fungsi jaringan irigasi. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Kerja bakti Perbaikan di Saluran Irigasi rusak sebagai berikut :



Sumber : UPTD Sumpat, 2026

Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan Kerja Bakti Perbaikan di Saluran Irigasi Rusak

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa kegiatan kerja bakti yang dilakukan dalam perbaikan dan pemeliharaan saluran irigasi menunjukkan adanya upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kondisi jaringan irigasi. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat turut membantu membersihkan saluran dari sampah, lumpur, dan material yang dapat menghambat aliran air, serta mendukung perbaikan ringan pada bagian saluran yang mengalami kerusakan. Kegiatan kerja bakti juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan fungsi irigasi, sehingga distribusi air ke lahan pertanian dapat berjalan lebih lancar. Dengan demikian, pelaksanaan kerja bakti tidak hanya membantu meringankan proses pemeliharaan yang dilakukan oleh UPTD, tetapi juga memperkuat koordinasi dan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan jaringan irigasi di wilayahnya. Gal tersebut sebagaimana dismapaikan oleh Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botokan Sebagai berikut:

“Dalam pemeliharaan saluran irigasi, kami juga melibatkan masyarakat melalui kegiatan kerja bakti. Biasanya masyarakat bersama pemerintah desa dan petugas ikut membersihkan saluran dari sampah, lumpur, dan rumput yang dapat menghambat aliran air. Kalau ada bagian saluran yang mengalami kerusakan ringan, kami juga melakukan perbaikan bersama sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan adanya kerja bakti ini, kondisi saluran

menjadi lebih terawat dan aliran air ke lahan pertanian dapat berjalan lebih lancar. Kegiatan ini juga membantu meningkatkan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menjaga jaringan irigasi.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil penelitian, peran representatif UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah diwujudkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kelompok tani, dan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan saluran irigasi, termasuk keberadaan bangunan liar dan jembatan tanpa izin. Selain itu UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo juga melakukan kegiatan kerja bakti dalam memperbaiki saluran irigasi yang rusak. Namun, masih ditemukannya kendala tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Temuan ini sejalan dengan teori Jim Ife yang menyatakan bahwa peran representatif menekankan kemampuan pemerintah sebagai fasilitator dalam membangun kerja sama, menjembatani komunikasi, dan mewakili kepentingan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian terdahulu berjudul Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur dalam Mengelola Irigasi di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarpemangku kepentingan dan komunikasi yang efektif. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara UPTD, pemerintah desa, P3A, dan masyarakat perlu terus dilakukan agar perawatan dan pengendalian saluran irigasi dapat berjalan lebih optimal.

D. Peran Teknis

Peran teknis merupakan kemampuan yang dimiliki individu maupun kelompok dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, seperti melakukan pendataan, mengolah dan menganalisis data, serta memanfaatkan teknologi dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Pada dasarnya, peran teknis berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan aspek-aspek teknis yang diperlukan agar program atau kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan [17]. Dalam penelitian ini, peran teknis membahas kemampuan UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan pengendalian saluran irigasi. Peran teknis tersebut berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan pendataan kondisi jaringan irigasi, monitoring dan analisis kerusakan saluran, pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemeliharaan dan pengendalian saluran irigasi. Keberhasilan pelaksanaan peran teknis dipengaruhi oleh kompetensi petugas lapangan, kecukupan peralatan operasional, serta efektivitas pelaksanaan monitoring dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi pada jaringan irigasi. Kondisi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dedy Wiehanto, ST selaku Kepala UPTD Sumpat sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan perawatan dan pengendalian saluran irigasi, kami terlebih dahulu melakukan pendataan dan monitoring secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi jaringan irigasi serta mengidentifikasi titik-titik yang mengalami kerusakan atau penyumbatan. Hasil monitoring tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan penyusunan jadwal pemeliharaan. Selain itu, kami juga memanfaatkan aplikasi dan dokumentasi lapangan sebagai pendukung dalam proses pelaporan agar penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botokan sebagai berikut :

“Sebelum melakukan perawatan saluran irigasi, kami selalu melakukan survei dan pengecekan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi saluran. Dari hasil pengecekan tersebut kami mendata titik-titik yang mengalami kerusakan, penyumbatan, atau sedimentasi, kemudian menentukan lokasi yang harus segera ditangani berdasarkan tingkat urgensinya. Dalam pelaksanaan pekerjaan, kami juga memanfaatkan dokumentasi dan laporan hasil monitoring sebagai dasar penyusunan tindak lanjut pemeliharaan.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran teknis UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan melalui kegiatan pendataan, survei, monitoring, dan identifikasi kondisi saluran irigasi secara langsung di lapangan. Hasil monitoring digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan penyusunan jadwal pemeliharaan, sedangkan dokumentasi serta pelaporan dimanfaatkan untuk mendukung proses tindak lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perawatan dan pengendalian saluran irigasi dilakukan berdasarkan kondisi aktual di lapangan sehingga penanganan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan monitoring irigasi oleh petugas UPTD sebagai berikut :



Sumber : UPTD Sumput, 2026

Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Monitoring Irigasi

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa petugas melakukan monitoring irigasi di setiap saluran irigasi di bawah naungan UPTD Sumput. Hasil dari kegiatan monitoring lapangan yang menunjukkan bahwa petugas UPTD melakukan pengecekan kondisi saluran irigasi secara berkala, mendokumentasikan titik-titik kerusakan, serta menyusun laporan hasil monitoring sebagai dasar pelaksanaan kegiatan perawatan. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perawatan dan pengendalian saluran irigasi tidak dilakukan secara langsung tanpa perencanaan, melainkan diawali dengan proses pendataan dan analisis kondisi lapangan. Dengan adanya proses tersebut, sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih efisien karena penanganan difokuskan pada lokasi yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi atau berpotensi mengganggu distribusi air. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Santoso selaku Juru Sekunder Botokan sebagai berikut :

“Kami melakukan monitoring secara rutin pada seluruh saluran irigasi yang menjadi kewenangan UPTD Sumput. Dalam setiap monitoring, petugas turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi saluran, mendata dan mendokumentasikan apabila terdapat kerusakan, penyumbatan, atau sedimentasi. Hasil monitoring tersebut kemudian kami susun dalam bentuk laporan sebagai dasar untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas perawatan dan pengendalian. Jadi, sebelum pekerjaan dilaksanakan, kami selalu melakukan pendataan dan analisis kondisi di lapangan agar penanganan yang dilakukan tepat sasaran dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.” (Wawancara, 07 Juli 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi kegiatan monitoring, dapat disimpulkan bahwa UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan peran teknis dengan baik melalui kegiatan pendataan, survei, monitoring, identifikasi kondisi saluran irigasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan sebagai dasar penentuan prioritas perawatan dan pengendalian. Pemanfaatan hasil monitoring lapangan dan dokumentasi menunjukkan bahwa setiap tindakan pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan kondisi aktual sehingga penanganan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Temuan ini sejalan dengan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero yang menyatakan bahwa peran teknis merupakan kemampuan organisasi dalam menerapkan keterampilan teknis, melakukan pengumpulan dan analisis data, serta memanfaatkan sarana pendukung untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Peranan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Menangani Masalah Banjir”, yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dinas sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis melalui kegiatan survei lapangan, identifikasi kondisi infrastruktur, pemetaan lokasi prioritas, serta penyusunan laporan sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi dianalisis menggunakan teori peran Jim Iff yang meliputi peran fasilitator, peran edukasional, peran representatif, dan peran teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator telah dilaksanakan oleh UPTD dengan tingkat pencapaian yang berbeda. Pertama, pada indikator peran fasilitator, UPTD telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan perawatan saluran irigasi, penyediaan berbagai media pengaduan, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kendala komunikasi dan koordinasi dengan petani yang menyebabkan kesalahpahaman dalam pengelolaan irigasi. Kedua, pada indikator peran edukasional, UPTD telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan saluran irigasi, pembagian air, dan pentingnya menjaga kebersihan saluran, tetapi kegiatan tersebut masih bersifat insidental sehingga belum mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, pada indikator peran representatif, UPTD telah membangun koordinasi dengan pemerintah desa, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), kelompok tani, dan masyarakat dalam menangani berbagai permasalahan irigasi. Meskipun demikian, masih ditemukannya bangunan liar dan jembatan tanpa izin menunjukkan bahwa koordinasi dan kepatuhan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Keempat, pada indikator peran teknis, UPTD telah melaksanakan kegiatan pendataan, survei, monitoring lapangan, identifikasi kerusakan, dokumentasi, dan penyusunan laporan sebagai dasar penentuan prioritas perawatan saluran irigasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perawatan dan pengendalian telah dilaksanakan berdasarkan kondisi aktual di lapangan sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam perawatan dan pengendalian saluran irigasi telah sesuai dengan konsep peran menurut Jim Iff, meskipun masih diperlukan peningkatan terutama pada aspek komunikasi, koordinasi, dan pelaksanaan edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan saluran irigasi dapat berjalan lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Peran UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam Perawatan dan Pengendalian Saluran Irigasi di Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya keluarga serta UPTD Air dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada serta narasumber yang terlibat serta seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Ditjen Sumber Daya Air, *Pembaharuan Pengelolaan Sumber Daya Air: Peran Budaya Lokal dalam Menunjang Sumber Daya Air yang Berkelanjutan*, 2003.
- [2] R. S. P. Fadilla, “Pengembangan sumber daya manusia di Kantor Desa Sampalan Kecamatan Kutawaluya,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Karawang, Indonesia. [Online]. Available: <https://ejournal.upbkarawang.ac.id>
- [3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, 2006.
- [4] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, 2020.
- [5] M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*. Bandung, Indonesia: CV Mandar, 2017.
- [6] Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta, Indonesia: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, 2015.
- [7] D. S. R. A. U. Ndjurumbaha, “Efektivitas pelaksanaan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumba Timur dalam mengelola irigasi di Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [8] H. Listyawati and T. Suharso, “Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman,” *Mimbar Hukum*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [9] H. E. Azlan, “Peranan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam menangani masalah banjir,” *JOM FISIP*, vol. 10, no. 1, 2023.

- [10] F. Fitriana, Y. A. Hilman, and B. Triono, “Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam upaya pelestarian kesenian budaya lokal,” *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, vol. 2, no. 1, p. 1, 2020.
- [11] R. D. Sumilat, “Peran pemerintah dalam pengembangan pasar tradisional (studi di Pasar Langowan),” *Jurnal Politico*, vol. 10, no. 3, 2021.
- [12] J. Ife and F. Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Jakarta, Indonesia: UI Press, 2014.
- [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: CV Alfabeta, 2016.
- [14] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta, Indonesia: UI Press, 2014.
- [15] C. E. M. R. Dani *et al.*, “Peran pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, vol. 8, no. 1, pp. 14–24, 2024.
- [16] D. I. M. Rizal *et al.*, “Peran pemerintah dalam mendorong kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia,” *Pallangga Praja*, vol. 5, no. 2, pp. 155–161, 2023.
- [17] I. A. Aprilia *et al.*, “Peran komunikasi pemerintah untuk mewujudkan good governance melalui pelayanan publik,” *Communication*, vol. 13, no. 1, pp. 70–85, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.